

BAB II

POTRET SOSIAL WILAYAH DAN KETERWAKILAN

PEREMPUAN DI PARLEMEN PEMALANG

2.1. Kabupaten Pemalang dalam Lensa Statistik

Kabupaten Pemalang berada di bagian barat bentangan pantai utara daerah Jawa Tengah. Batas wilayah Pemalang di sebelah utara bersebelahan dengan Laut Jawa. Di sisi barat dan timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km² (BPS Pemalang, 2024). Di atas wilayah tersebut terhampar 14 kecamatan dan 223 desa/kelurahan. Bantarbolang menjadi kecamatan dengan luas wilayah paling besar, yakni 12,48% dari keseluruhan luas Pemalang. Adapun Warungpring dan Comal menjadi kecamatan dengan luas wilayah paling kecil, masing-masing hanya 2,36% dan 2,38% dari total luas Pemalang.

Tabel 2.1.

Daftar Kecamatan di Kabupaten Pemalang

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (%)
1.	Bantarbolang	12,48%
2.	Watukumpul	11,57%
3.	Belik	11,17%
4.	Pemalang	9,14%
5.	Randudongkal	8,10%
6.	Pulosari	7,85%

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (%)
7.	Bodeh	7,71%
8.	Petarukan	7,29%
9.	Taman	6,04%
10.	Ulujami	5,43%
11.	Ampelgading	4,78%
12.	Moga	3,71%
13.	Comal	2,38%
14.	Warungpring	2,36%

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2024)

Banyaknya penduduk di Kabupaten Pemalang berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 1.523.622 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah yang lebih besar, yakni 772.034 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 751.588 jiwa. Dari data tersebut, Kecamatan Pemalang menempati urutan pertama sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pemalang. Angkanya mencapai 13,63% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pemalang. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah letak yang strategis sebagai ibu kota Kabupaten Pemalang, dengan mudahnya akses sarana pra sarana, walaupun secara luas wilayah masih lebih kecil dibandingkan tiga kecamatan lainnya yang berada di daerah pegunungan bagian selatan Kabupaten Pemalang. Di sisi lain, Kecamatan Comal menjadi wilayah dengan penduduk terpadat. Angka kepadatan penduduknya mencapai 3.551 jiwa/km², melebihi tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pemalang yang berada pada angka 1.315 jiwa/km².

Jumlah penduduk di suatu wilayah akan menentukan sebaran Daerah Pemilihan (Dapil), yang selanjutnya juga berkorelasi dengan banyaknya alokasi kursi legislatif dalam suatu Pemilihan Umum (Pemilu). Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 6 Dapil pada Pemilu 2024. Kuota anggota legislatif Pemalang dialokasikan berjumlah 50 kursi. Adapun pembagian Dapil dan besaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Sebaran Dapil dan Besaran DPT Kabupaten Pemalang 2024

Dapil	Kecamatan	DPT		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Dapil 1	Pemalang	76.733	75.940	152.673
Dapil 2	Taman	72.167	71.213	143.380
Dapil 3	Petarukan	65.959	64.951	130.910
	Ampelgading	29.049	28.970	58.019
Dapil 4	Comal	36.340	36.004	72.344
	Ulujami	44.114	43.194	87.308
	Bodeh	24.867	24.302	49.169
Dapil 5	Watukumpul	30.123	28.454	58.577
	Belik	47.019	45.238	92.257
	Moga	29.236	28.165	57.401
	Pulosari	24.455	24.049	48.504
Dapil 6	Warungpring	17.755	17.239	34.994
	Randudongkal	44.255	43.768	88.023
	Bantarbolang	34.020	33.630	67.650

Sumber: KPU Kabupaten Pemalang (2024)

Statistik mencatat Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah, berada di urutan empat setelah Kabupaten Kebumen, Brebes, dan Wonosobo (BPS Jateng, 2024). Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang sebesar 14,92%, lebih tinggi dari angka kemiskinan di Jawa Tengah yang memiliki persentase 10,47%. Tiga sektor utama mata pencaharian penduduk Pemalang adalah pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian didukung dengan kondisi tanah yang subur, utamanya di sebagian besar wilayah yang memiliki topografi dataran rendah di sisi timur dan dataran tinggi di sisi selatan. Berkembangnya industri pengolahan dan jasa banyak ditopang oleh investor yang membangun industri tekstil di Kabupaten Pemalang. Namun, pengelolaan tiga sektor utama perekonomian di Pemalang belum berjalan secara maksimal.

Banyaknya penduduk miskin di Pemalang linear dengan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini. Rata-rata penduduk Pemalang hanya merupakan lulusan SD/ sederajat. Data menunjukkan jenjang pendidikan SMA, SMK, Diploma, dan Strata 1, 2, 3 jumlahnya lebih banyak ditamatkan oleh penduduk laki-laki.

Tabel 2.3.

Tingkat Pendidikan Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Pemalang

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/Belum Sekolah	2,85%	7,68%	5,31%
Tidak/Belum Tamat SD	22,95%	25,03%	24,01%
SD/Sederajat	34,04%	33,72%	33,87%
SMP/Sederajat	20,11%	20,54%	20,33%

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
SMA/Sederajat	9,67%	4,55%	7,06%
SMK/Sederajat	6,48%	4,31%	5,38%
Diploma I, II	0,09%	0,23%	0.16%
Diploma III	0,75%	0,59%	0.82%
Diploma IV, S1, S2, S3	3,07%	3,05%	3,06%
Total	100%	100%	100%

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2024)

Kendati demikian, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Pemalang masuk kategori yang cukup tinggi (81,57%), bahkan melebihi IDG Jawa Tengah (73,78%). IDG diukur dengan tiga indikator, meliputi keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional, dan persentase kontribusi pendapatan perempuan. Ini menandakan bahwa akses dan peran aktif perempuan dalam dunia politik dan ekonomi di Kabupaten Pemalang dapat dikatakan semakin terbuka luas.

Angka kemiskinan yang cenderung tinggi ternyata justru membuka peluang bagi perempuan untuk turut serta bekerja dan menggerakkan ekonomi agar dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Realitas ini juga menyebabkan penduduk Pemalang, terutama laki-laki, lebih banyak yang merantau. Karena itulah, dalam aktivitas sehari-hari nampak lebih banyak kegiatan-kegiatan yang diinisiasi dan digerakkan oleh perempuan seperti arisan, pengajian, kelompok UMKM, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi dan sosial ini perlahan membentuk kesadaran perempuan untuk terlibat dalam sektor yang tak kalah krusial, yakni politik. Beberapa kondisi tersebut berpengaruh pada tinggi rendahnya IDG.

2.2. Heterogenitas Masyarakat dan Budaya Pedesaan di Kabupaten Pemalang

Letak geografis yang membagi wilayah Kabupaten Pemalang menjadi beberapa topografi berkorelasi dengan munculnya heterogenitas masyarakat. Kategori masyarakat yang hidup di topografi tepi laut, bukan tepi laut, lereng/puncak, lembah, dan dataran memiliki nilai dan budaya yang berbeda. Dalam klasifikasi yang lebih sederhana, masyarakat Kabupaten Pemalang kerap dibedakan menjadi masyarakat pesisir, masyarakat pantura, dan masyarakat pegunungan. Perbedaan tersebut pada tingkatan tertentu juga dapat memengaruhi basis dan orientasi politik masyarakat.

Masyarakat pesisir identik dengan mereka yang tinggal dekat dengan wilayah pantai dan memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Ulujami dan sebagian kecil masyarakat Kecamatan Petarukan masuk dalam kategori ini. Adapun kategori masyarakat pantura (pantai utara) lebih merujuk pada mereka yang tinggal di sepanjang jalur pantura (jalan besar) dengan topografi dataran dan bermatapencaharian di sektor perdagangan, jasa, industri, serta pertanian. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini banyak tersebar di Kecamatan Taman, Pemalang, Comal, Ampelgading, dan sebagian Kecamatan Bodeh. Di bagian tengah dan selatan Kabupaten Pemalang, atau masuk dalam Dapil 5 dan Dapil 6 di Pemilu 2024, hampir seluruh masyarakatnya masuk dalam kategori masyarakat pegunungan. Wilayah ini dikenal dengan udara yang sejuk dan tanah yang subur, mendukung kehidupan agraris masyarakat setempat yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Sikap politik masyarakat di

masing-masing kategori sangat dipengaruhi oleh kondisi yang membangun karakteristik mereka. Masyarakat pantura dinilai lebih terbuka dan rasional karena mudahnya akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Masyarakat Kabupaten Pemalang memiliki perbedaan dalam penggunaan dialek Bahasa Jawa. Misalnya, masyarakat Comal cenderung menggunakan dialek Bahasa Jawa yang lebih identik dengan gaya Pekalongan, sedangkan masyarakat di bagian barat dan selatan Kabupaten Pemalang memiliki ciri khas dengan Bahasa Jawa Ngapak. Dialek tersebut banyak dipengaruhi oleh kultur daerah perbatasan di sekeliling masing-masing wilayah. Dalam hal ini, perbedaan kategorisasi wilayah juga berpengaruh ke aspek heterogenitas budaya masyarakat Pemalang.

Dari total 223 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang, hanya 12 wilayah yang berstatus sebagai kelurahan. Artinya, 211 wilayah administratif lainnya merupakan desa. Status administratif tersebut turut berpengaruh pada budaya masyarakat, yang menciptakan lahirnya dikotomi desa – kota di Kabupaten Pemalang. Masyarakat kelurahan identik dengan gaya hidup yang lebih mirip dengan masyarakat kota. Beberapa cirinya ditandai dengan modernitas, tingkat konsumsi lebih tinggi, padatnya mobilitas atau arus penduduk keluar, dan memiliki hubungan sosial yang longgar. Sebaliknya, masyarakat desa cenderung memegang nilai-nilai tradisional, banyak melakukan aktivitas di dalam kelompok, dan membudayakan gotong royong, sehingga solidaritas masyarakat terbangun secara lebih kuat.

Adanya dikotomi desa – kota dalam konteks politik memiliki kaitan dengan biaya atau *cost* yang harus dikeluarkan oleh kandidat. Misalnya dalam Pemilu Legislatif Pemalang 2024, informan menuturkan bahwa untuk menarget konstituennya yang berasal dari masyarakat kota (sebagian besar masuk dalam tipologi masyarakat pantura) di Kabupaten Pemalang, cenderung menelan biaya politik yang lebih mahal. Biaya tersebut mencakup uang operasional, dana komunitas, dan politik uang (*money politics*). Masyarakat kota dinilai lebih materialistis dibandingkan masyarakat desa. Namun, penerimaan politik uang di antara masyarakat desa dan kota tidak jauh berbeda. Mereka cenderung permisif, bahkan terkesan meminta politik uang itu sendiri. Bagi mereka, politik uang bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu. Ada pemaknaan lain yang melekat di atas pemberian politik uang. Seperti halnya simbol kemampuan ekonomi, kedermawanan kandidat, dan jaminan pengikat suara.

Tinggi rendahnya biaya politik tersebut juga dipengaruhi oleh sebaran dapil caleg berkompetisi. Ada dapil-dapil yang disebut sebagai “dapil neraka” karena berbagai faktor. Dapil Pemalang 1, 2, dan 6 dikenal sebagai dapil neraka karena diisi oleh calon-calon dengan latar belakang petinggi parpol dan jumlah DPT yang besar. Karena dua faktor tersebut, persaingan relatif sengit. Tentu saja, biaya politik yang dikeluarkan di dapil-dapil tersebut juga lebih mahal untuk memenangkan persaingan. Dapil Pemalang 1 dan 2 menjadi dapil prestisius karena wilayahnya sangat strategis sebagai pusat pemerintahan. Dapil Pemalang 6, meskipun letaknya jauh di sisi selatan dan masuk kategori desa, angka DPT-nya tergolong besar. Masyarakat di dapil tersebut juga tergolong memiliki loyalitas

kepatronan yang kuat dengan kiai. Calon dari latar belakang lain harus menyiapkan modalitas yang sama kuatnya untuk bisa bertarung di dapil ini, termasuk modalitas finansial.

Dari sisi kultur, budaya pedesaan di Kabupaten Pemalang masih cukup kental. Selain kepatronan kepada kiai dan tokoh-tokoh yang dituakan, tradisi yang didasari nilai-nilai falsafah Jawa tersemayam dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, masyarakat pesisir memiliki tradisi sedekah laut, masyarakat pegunungan mengadakan sedekah bumi, dan masyarakat pantura memiliki tradisi khas yang disebut *sintrenan*. Makna dalam tradisi-tradisi tersebut menyiratkan tentang rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil yang didapat masyarakat dari laut dan alam, permohonan kepada Sang Pencipta agar senantiasa diberikan keselamatan dan kelancaran, juga tentang pentingnya menjaga kearifan lokal. Semula, tradisi-tradisi itu kerap dikaitkan dengan hal mistis. Namun, pergeseran era yang semakin modern menandai adanya perbedaan pemaknaan yang semakin kontekstual. Tradisi banyak digunakan sebagai sarana hiburan dan momen untuk menumbuhkan solidaritas masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik, para kandidat juga bisa memanfaatkan tradisi sebagai unsur yang dimasukkan dalam aktivitas kampanye mereka.

Tradisi-tradisi seperti *slametan* (doa bersama) dan peringatan hari-hari besar Islam dalam nuansa Jawa seperti *ruwahan* (Menyambut Bulan Ramadan), *muludan* (Maulid Nabi Muhammad), *rajaban* (Peringatan Isra' Mi'raj), juga mewarnai kehidupan berbudaya di Pemalang. Hal ini banyak dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.4.**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Pemalang**

Agama	Jumlah Penganut	Persentase
Islam	1.571.040	99,558%
Protestan	4.822	0,306%
Katolik	1.568	0,099%
Hindu	74	0,005%
Budha	163	0,010%
Konghuchu	17	0,001%
Lainnya	334	0,021%
Jumlah	1.578.018	100%

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang (2024)

Nilai-nilai budaya pedesaan, yang pada kadar tertentu lekat dengan patriarki, berpengaruh pada kiprah perempuan untuk berpolitik. Perempuan dianggap tidak cocok untuk terjun dalam dunia politik karena sudah dilekatkan atribusi peran-peran domestik seperti mengurus anak, bersih-bersih rumah, dan melayani keluarga maupun suami. Politik juga kerap dilabeli sebagai arena yang penuh persaingan dan kejam. Terlebih dalam lingkungan pedesaan yang sangat tradisional, peran perempuan di luar keluarga atau tempat tinggalnya sangat terbatas (Elizabeth, 2019). Namun, masuknya modernisasi dan industri ke berbagai daerah membuka kesempatan untuk perempuan turut aktif dalam sektor ekonomi. Keterbukaan akses ini juga meluas ke dunia politik. Kebutuhan untuk melindungi dan menyuarakan hak-hak perempuan pada akhirnya membawa masyarakat semakin sadar untuk memiliki wakil perempuan di parlemen.

2.3. Dinamika Politik di Parlemen Pemalang: Keterwakilan Perempuan dalam Angka dan Realitas

Alokasi 50 kursi wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Pemalang dalam setiap periode diwarnai dengan keterwakilan perempuan yang dinamis. Pemilu 2019 menjadi momentum kontestasi yang menghasilkan angka keterwakilan perempuan tertinggi di sepanjang sejarah politik parlemen Pemalang. Pada saat itu, sebanyak 16 orang dewan perempuan duduk di kursi parlemen. Adapun angka keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pemalang dari periode ke periode sejak diterapkannya *affirmative action* 30% adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Angka Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Pemalang

Periode Pemilu	Jumlah Anggota Dewan Terpilih		Persentase Keterwakilan Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Pemilu 2009	40	10	20%
Pemilu 2014	42	8	16%
Pemilu 2019	34	16	32%
Pemilu 2024	35	15	30%

Sumber: Arsip DPRD Kabupaten Pemalang & Wawancara Informan

Sejumlah informan menyampaikan bahwa Pemilu 2024 dapat disebut sebagai “pemilu gila”, karena rata-rata kandidat sepakat modal yang mereka keluarkan naik signifikan dari pemilu sebelumnya, utamanya modal finansial. Baik kandidat laki-laki maupun perempuan, mereka menghadapi tuntutan dan persaingan yang hampir sama terkait tingginya biaya politik yang harus

dikeluarkan. Hasil akhir Pemilu Legislatif Pemalang 2024 pada akhirnya berhasil mendorong terpenuhinya kuota perempuan, dengan angka genap 30%. Capaian ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh aturan konstitusi dalam UU Pemilu yang mewajibkan setiap partai politik untuk memenuhi kuota 30% bakal calon legislatif perempuan. Meskipun demikian, hal ini tetap layak untuk diapresiasi. Adanya wakil perempuan yang duduk di kursi legislatif dapat membawa aspirasi masyarakat dari setiap dapil, terutama aspirasi soal isu perempuan, anak, keluarga, dan kesetaraan gender.

Tabel 2.6.

Keterwakilan Perempuan Menurut Partai Politik di DPRD Pemalang 2024

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PDIP	8	4	12
PKB	10	1	11
Gerindra	2	5	7
Golkar	5	2	7
PPP	6	1	7
PKS	3	2	5
PAN	1	0	1
Jumlah	35	15	50

Sumber: Dokumen Profil Anggota DPRD Pemalang (2024)

Berdasarkan data di atas, Gerindra menjadi partai yang paling banyak memiliki legislator perempuan hasil Pemilu 2024. Di peringkat berikutnya disusul oleh PDIP, PKS, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Namun, keterwakilan perempuan dari masing-masing partai politik di DPRD Kabupaten Pemalang dalam setiap

periode pemilu tidak tetap. Jumlahnya dinamis dan tidak ada pola tertentu yang paten dari setiap partai. Secara keseluruhan, kursi paling banyak didapat oleh PDIP. Setidaknya dalam lima periode pemilu terakhir sejak 2004, PDIP selalu tampil menjadi pemenang suara di parlemen Pemalang. Posisi *runner up* secara bergantian ditempati oleh Golkar dan PKB.

Komposisi dominan ini menjadi menarik karena merepresentasikan tiga warna berbeda dalam dinamika perpolitikan di Pemalang. Jika dikaitkan dengan basis massa ketiga partai, ada relevansi dengan kategori *aliran* ala Clifford Geertz yang membagi masyarakat Jawa menjadi *abangan*, *santri*, dan *priyayi* (Amrozi, 2021). *Abangan* kerap dikaitkan sebagai basis pendukung PDIP, *santri* identik dengan PKB, dan *priyayi* memiliki corak yang khas dengan orang-orang Golkar. Akan tetapi, konotasi *priyayi* mengalami lebih banyak pergeseran definisi karena masuknya modernisasi dan berubahnya pola-pola kehidupan dalam masyarakat. Basis massa setiap partai pun tidak mutlak pada satu *aliran* atau diisi golongan-golongan tertentu, terlebih dengan adanya kecenderungan banyak partai semakin bergeser menjadi jenis *catch-all* atau bahkan *match-all* (Ufen, 2006; Aminuddin & Ramadhan, 2015) Temuan ini sejalan dengan kondisi dinamika politik di aras lokal, termasuk Pemalang.

Hal lain yang tidak kalah menarik dari dinamika politik di parlemen Pemalang adalah tampilnya dewan perempuan sebagai pimpinan parlemen lokal. Ajeng Triyani menjadi perempuan pertama yang duduk sebagai pimpinan legislatif di Pemalang. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 setelah menggantikan Subur Musholeh, rekan satu fraksinya. PKB

memang memberlakukan mekanisme *rolling* jabatan di setengah periode kepengurusan legislatif setelah melalui tahapan monitoring dan evaluasi internal partai. Hal itu didasari oleh alasan untuk menjaga loyalitas, meningkatkan integritas, dan membuka akses politik bagi sesama kader.

Keputusan PKB untuk menempatkan Ajeng di posisi yang sangat strategis bukan tanpa rasionalisasi. Ajeng merupakan politisi perempuan yang aktif di kepengurusan partai, organisasi, dan konstituen. Salah satu petinggi PKB di Pemalang menyebut Ajeng sebagai kader yang militan dan mempunyai kapabilitas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh konstituen di daerah pemilihannya. Bagi masyarakat, Ajeng adalah sosok politisi perempuan yang benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Penilaian ini berangkat dari komparasi bahwa mayoritas dewan perempuan di Pemalang cukup pasif. Kadangkala, banyak dari mereka yang belum paham tugas pokok serta fungsinya sebagai anggota DPRD. Mereka berangkat dengan modalitas yang sudah disiapkan oleh kerabat atau sponsor politiknya (biasanya laki-laki), tanpa memupuk persiapan yang matang. Akibatnya, keberhasilan mereka menduduki kursi parlemen hanya menjadi momentum sesaat yang sulit dipertahankan. Berbeda dengan Ajeng yang berhasil mempertahankan dan menaikkan posisi politiknya, karena ia merintis dan membangun semua modalitasnya dari bawah. Tak heran, Ajeng menjadi petahana perempuan yang kembali terpilih sebagai anggota legislatif untuk ketiga kalinya dari total empat kali kontestasi politik yang ia ikuti.

2.4. Gambaran Fenomena: Proses Kandidat Perempuan Menembus Medan Kontestasi di Parlemen Pemalang

Ajeng melewati kaderisasi politiknya di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelum itu, ia telah aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) selama menempuh pendidikan tinggi. Jaringan PMII telah banyak menghubungkannya dengan tokoh-tokoh di PKB. Keterhubungan ini juga dilandasi oleh persamaan ideologis. Ajeng merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU), begitupun dengan keluarganya. Walaupun bukan dari kalangan keluarga kiai ataupun petinggi partai, kiprah Ajeng dalam berorganisasi sangat matang. Semasa remaja, ia sudah aktif dalam organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Dalam konteks ini, organisasi menjadi tempat untuk menyiapkan bekal pengalaman dan membangun jaringan.

Bekal pengalaman tersebut mampu membentuk kesiapan Ajeng ketika harus melewati berbagai tahapan dalam kontestasi politik sebagai anggota DPRD. Mulai dari mekanisme pencalonan, penentuan daerah pemilihan (dapil), hingga penetapan nomor urut. Setiap langkahnya penuh dengan dinamika dan strategi. Setelah berhasil memperoleh kepercayaan rakyat, Ajeng menduduki berbagai posisi yang membentuk kapasitas dan kepemimpinannya. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa pencapaian di dunia politik tidak datang secara instan, melainkan hasil dari komitmen, perjuangan, dan dukungan dari masyarakat. Terlebih sebagai seorang perempuan, jalan politik yang harus ditapaki seringkali lebih terjal dibandingkan laki-laki.

2.4.1. Mekanisme Pencalonan di Internal PKB

Secara garis besar, PKB memberlakukan syarat-syarat yang sama dengan ketentuan regulasi dalam UU Pemilu perihal pencalonan kader sebagai anggota legislatif. Setiap kader yang dicalonkan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana terlampir dalam Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mulai dari syarat umur, pendidikan, serta kelengkapan administratif lainnya. Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Pematang Jaya menyatakan bahwa tidak ada pengkhususan maupun diskriminasi gender dalam proses pencalonan. Sepanjang kandidat memenuhi kriteria yang diberlakukan, maka kandidat dapat maju menjadi bakal calon legislatif dari PKB. Keterangan tambahan dari informan juga menyampaikan bahwa tidak ada mahar politik untuk dapat diloloskan menjadi bakal calon. PKB hanya memberlakukan iuran gotong royong kepada calon yang berkontestasi, khususnya untuk membayar saksi.

Aturan yang menyorot secara langsung perihal keterwakilan perempuan dalam legislatif telah dimuat pada Pasal 245 dan Pasal 246 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setiap partai setidaknya harus mencantumkan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif. Dalam hal penentuan nomor urut, regulasi juga telah memberlakukan *zipper system*, di mana dari setiap 3 nama bakal calon harus memuat sedikitnya 1 nama kandidat perempuan. Menyikapi aturan tersebut, DPC PKB Pematang Jaya berusaha mendorong terpenuhinya kuota legislatif perempuan. Prosedur tersebut secara administratif memang sudah terpenuhi. Namun, tidak semua kandidat perempuan yang maju betul-betul dapat bertarung

untuk kontestasi mereka. Beberapa, atau bahkan sebagian besar dari mereka, hanya diajukan untuk menggugurkan kewajiban partai secara normatif.

Regulasi yang ada sebenarnya pun belum terlalu kuat untuk benar-benar mewujudkan keterwakilan perempuan yang proporsional. Nomenklatur yang disebutkan dalam undang-undang baru sebatas representasi sebagai bakal calon, bukan merujuk pada keharusan untuk mendudukkan wakil perempuan sebanyak 30% di parlemen. Di samping itu, sanksi yang diberlakukan tidak tegas. Partai yang tidak dapat memenuhi kuota 30% bakal calon perempuan hanya akan dikenai sanksi berupa laporan pemberitaan di media nasional. Artinya, sanksi itu dikembalikan kepada publik untuk menilai apakah mereka akan berpihak kepada partai yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Ajeng menyampaikan bahwa realitas tersebut berpengaruh pada proses pencalonannya. Meskipun didorong oleh regulasi, langkah perempuan untuk dapat terpilih menjadi anggota parlemen terhitung masih lebih berat dibandingkan laki-laki. Pertama, ia harus melalui proses meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu agar merasa pantas diajukan sebagai calon. Tahap ini menjadi penting, mengingat kandidat perempuan biasanya hanya diajukan sebagai formalitas untuk memenuhi kuota 30%. Kedua, ia bersaing dengan sesama rekan satu partainya dalam proses nominasi. Ada kecenderungan orang-orang lama dan mereka yang memiliki modal lebih besar dapat menggeser posisi kandidat lainnya. Lagi-lagi, posisi perempuan relatif dirugikan karena dianggap memiliki daya tawar yang lebih rendah. Ketiga, pertarungan yang tak kalah berat adalah pada saat ia harus memperebutkan suara pemilih. Tingkat penerimaan masyarakat dan semakin mahal biaya politik

membuat kandidat perempuan perlu memutar otak dan pandai bersiasat. Bagaimana tidak, mereka yang sering dilekatkan dengan peran domestik tentu dapat mengalami dependensi finansial kepada suami, ayah, atau kerabat mereka. Laki-laki dianggap lebih produktif dalam menghasilkan uang. Akibatnya, kepemilikan modal ini akan berpengaruh pada proses-proses strategis seperti penempatan dapil dan penentuan nomor urut kandidat. Dua proses tersebut sering berpengaruh terhadap hasil akhir keterpilihan.

2.4.2. Penempatan Dapil dan Penentuan Nomor Urut

Partai politik memiliki kuasa penuh dalam menentukan dapil dan nomor urut kandidat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 241 Ayat (2) UU Pemilu, bakal calon diseleksi oleh partai politik sesuai dengan aturan internalnya. Peraturan tersebut meliputi AD/ART partai dan instrumen lain yang terkait dengan mekanisme pencalonan. Biasanya, proses penempatan dapil dan penentuan nomor urut dilakukan melalui rapat pleno. Proses ini sarat akan praktik tawar menawar. Karakteristik dapil yang berbeda-beda membuat para caleg biasanya mengincar dapil potensial dan tidak berbiaya tinggi. Hal yang tak kalah diperebutkan adalah posisi nomor urut. “Nomor topi” atau deretan nomor-nomor muda seperti 1, 2, 3 masih menjadi primadona. Kecenderungan ini diperkuat dengan riset yang menunjukkan bahwa caleg-caleg dengan nomor urut muda, terutama nomor 1, memiliki peluang terpilih yang lebih besar. Masyarakat yang tidak mengenal satupun caleg di wilayahnya cenderung akan menjatuhkan pilihan pada nomor urut satu.

DPC PKB Pemalang memberlakukan penempatan dapil caleg disesuaikan dengan domisili. Artinya, tempat tinggal kandidat menjadi pertimbangan prioritas bagi partai untuk mendistribusikan daerah pemilihan. Rasionalisasi dari prioritas tersebut adalah domisili caleg berpotensi besar untuk menjadi lumbung suara. Caleg yang berada satu lingkup tempat tinggal dengan konstituen dianggap memiliki keterikatan emosional dan jaringan yang lebih kuat. PKB juga memberikan prioritas pada caleg petahana dalam hal penempatan dapil. Petahana dipandang telah memiliki basis suara dan berpotensi lebih besar untuk terpilih kembali. Namun, PKB tetap membuka peluang kepada caleg yang berdomisili di luar dapil untuk maju, dengan pertimbangan kuota kursi dan potensi. Misal, jika di satu dapil ada surplus pendaftar, maka caleg tertentu bisa dipindah dengan kesepakatan ke dapil yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi alokasi kuota. Ketika mekanisme distribusi caleg untuk memenuhi kuota dapil belum terpenuhi, PKB mengambil alternatif untuk mengajukan calon “formalitas”. Kebanyakan adalah perempuan, karena ada aturan kuota afirmasi 30% bakal calon perempuan dan sulitnya menemukan caleg perempuan potensial.

Ajeng pernah menjadi caleg formalitas sebagaimana yang dimaksud di atas. Periode pertama ia maju sebagai calon legislatif di tahun 2009 semula hanya untuk memenuhi kuota afirmasi. Namun, yang membedakan dirinya dengan caleg formalitas lain adalah kapabilitas dan usaha yang ia lakukan sepanjang proses kontestasi. Latar belakangnya sebagai seorang aktivis dan bagian dari kultural NU membuat Ajeng tetap melakukan tugas-tugas membangun dan merawat konstituen secara serius. Baginya, alasan formalitas sekalipun tetaplah sebuah amanah yang

harus disikapi dengan baik. Terbukti, di kontestasi berikutnya ia menjadi caleg potensial yang meraih suara cukup besar. Selama empat kontestasi berturut-turut, Ajeng selalu maju di dapil yang sama, meliputi Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Petarukan. Dapil ini dinilai Ajeng sebagai dapil yang tidak berbiaya tinggi. Kedekatan secara sosiologis dan psikologis menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Mekanisme penentuan nomor urut kandidat lebih kompleks dibandingkan penempatan dapil. Proses tawar-menawar terjadi lebih kentara. Ada beberapa pertimbangan partai dalam menentukan nomor urut kandidat, seperti prioritas kepada kader, *incumbent*, atau bahkan *new comer* yang memiliki “surat sakti”. Pada saat pertama kali maju sebagai calon legislatif di Pemilu 2009, Ajeng mendapat nomor urut 5. Saat itu ia bukan orang partai dan hanya berperan sebagai caleg formalitas untuk memenuhi kuota afirmasi perempuan. Di kontestasi berikutnya pada tahun 2014, ia mendapat nomor urut 1 karena sudah menjadi pengurus partai dan memiliki posisi sebagai *incumbent*. Dinamika kembali terjadi di Pemilu 2019. Nomor urut Ajeng bergeser dua ke bawah dan harus menerima berada pada nomor urut 3. Ia menyampaikan bahwa ada kader lain yang memiliki modalitas finansial sangat besar dan didorong oleh “surat sakti” dari pusat. Barulah pada Pemilu 2024 ia kembali mendapat nomor urut 1, setelah membuktikan melalui kinerja dan jejak kepartaian yang baik.

Walapun selama rentang periode 2014 – 2019 Ajeng tidak terpilih sebagai dewan, tetapi militansinya kepada PKB dirasa cukup menjadi pertimbangan untuk tetap menempatkannya di nomor urut 1. Sebab itulah ia melakukan resistensi secara

terselubung sebagai buntut dari ketidakpuasan. Kala itu Ajeng menyampaikan protes melalui cuitan media sosialnya secara tersirat dengan menyebut lebih baik mundur. Ia juga menyambangi para kiai dan nyai yang dianggap sebagai mentornya. Namun, resistensi Ajeng berhasil diredam dengan saran-saran dari para mentor. Nomor urut memang memegang peran penting, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana para kandidat tetap menghidupi jaringan serta basis suaranya agar tetap dipilih. Saran itulah yang ditekankan oleh mentor-mentor Ajeng agar dirinya tetap berada di satu jalan yang sama dengan partai.

2.4.3. Jabatan di Tiga Periode Keterpilihan

Ajeng menempati posisi jabatan yang berbeda-beda sepanjang tiga periode keterpilihannya di DPRD Kabupaten Pemalang. Model yang diberlakukan di DPRD Pemalang adalah setiap anggota komisi merangkap menjadi anggota badan tertentu untuk memaksimalkan jumlah anggota dan fungsi alat kelengkapan dewan. Posisi sebagai Wakil Ketua I menjadi jabatan tertinggi yang pernah ditempati oleh Ajeng selama ia berkarir di parlemen Pemalang.

Tabel 2.7.

Jabatan Kandidat di DPRD Kabupaten Pemalang

Periode	Jabatan
2009 – 2014	Anggota Komisi C (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Anggota Badan Musyawarah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2019 – 2024	Sekretaris Komisi B (Bidang Pembangunan) Anggota Badan Musyawarah Wakil Ketua I

Periode	Jabatan
2024 – 2029	Anggota Komisi C (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Anggota Badan Anggaran

Sumber: Arsip DPRD Kabupaten Pemalang & Wawancara Informan

Ajeng dua kali ditempatkan di Komisi C yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan. Hal ini disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan profesi Ajeng sebelumnya di bidang akuntansi. Latar belakang ini juga relevan dengan ditempatkannya Ajeng sebagai anggota badan anggaran. Di Periode 2019, penempatan Ajeng sebagai Sekretaris Komisi B banyak didorong oleh *track record* Ajeng sebagai kader pendamping desa. Ia tidak berpangku tangan begitu saja ketika gagal terpilih pada Pemilu 2014. Dirinya tetap aktif sebagai pengurus struktural PKB Pemalang. Di samping itu, Ajeng banyak berkontribusi di pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti menghidupkan majelis, pengajian, dan menjadi guru TPQ. Ia juga berperan sebagai penghubung masyarakat yang mengajukan dana perbaikan musala, masjid, madrasah, dan sejenisnya ke rekan-rekannya yang memiliki wewenang. Dunia aktivisme yang lekat dengan Ajeng sangat linear dengan posisinya sebagai anggota badan musyawarah. Semua posisi tersebut menandakan bahwa Ajeng ditempatkan pada jabatan tertentu karena bekal pengalaman dan kapabilitas yang memadai di bidang sosial dan politik.

Rolling jabatan di internal Fraksi PKB Pemalang yang menaikkan posisi Ajeng sebagai Wakil Ketua I pada tahun 2022 juga didasari oleh pertimbangan *track record*. Logikanya, akan sangat sulit bagi dewan perempuan untuk duduk di posisi tersebut. Medan pertempuran politik sebelumnya di sepanjang proses

kontestasi pun sudah sangat maskulin dan kurang berpihak pada perempuan. Terlebih, corak ideologi PKB yang lebih dikenal sebagai partai islamis banyak dipandang tidak ramah gender. Namun, stereotip tersebut berhasil didobrak dengan tampilnya Ajeng sebagai perempuan pertama yang menempati kursi pimpinan. Ia membuktikan bahwa kegigihan dan kapabilitas dapat membuat perempuan bisa mendapatkan akses yang setara. Bukan hanya dalam aspek prestise jabatan politik yang nampak sebagai hasil, tetapi juga dalam proses menuju hasil tersebut. Tak terkecuali dalam konteks membangun dan merawat jaringan sebagai aspek penting yang menopang keterpilihannya.